

Perlawanan Keratuan Islam Darah Putih Terhadap Kolonialisme Belanda di Lampung Tahun 1850-1856 M

Binti Fadilah Arfi

Mahasiswa Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

dila.bifa@gmail.com

Abstract

This study is a local study that discusses the resistance movement of Keratuan Islam Darah Putih against Dutch colonialism in South Lampung in 1850-1856 M. Keratuan Islam Darah Putih is one of the rulers in Lampung who have blood relation with the sultanate of Banten. Discussion of the resistance movement is a continuation of the existing research by focusing the year 1850-1856 as the process and the mounting of the Islamic community resistance movement in Lampung and the end of the existing Islamic government in Lampung, namely Keratuan Islam Darah Putih. In addition, the unity of the Keratuan Islam Darah Putih in 1850-1856 was a large-scale resistance involving some communities of Banten and Lampung. The discussion to be studied in this study includes several important points. First, the circumstances of Lampung before the Resistance of the Keratuan Islam Darah Putih, the two processes of the resistance movement, from preparation to war, and thirdly, the impact of the resistance movement. The method used in this research is historical research methods include heuristics, criticism, interpretation, and historiography.

Keywords: resistance, Keratuan Islam Darah Putih, Dutch colonialism

Abstrak

Kajian ini merupakan penelitian lokal yang membahas gerakan perlawanan Keratuan Islam Darah Putih terhadap kolonialisme Belanda di Lampung Selatan tahun 1850-1856 M. Keratuan Islam Darah Putih merupakan salah satu penguasa di Lampung yang mempunyai hubungan darah dengan kesultanan Banten. Pembahasan tentang gerakan perlawanan ini merupakan kelanjutan dari penelitian yang sudah ada dengan memfokuskan tahun 1850-1856 M sebagai proses dan memuncaknya gerakan perlawanan masyarakat Islam yang ada di Lampung serta berakhirnya pemerintahan Islam yang ada di Lampung, yaitu Keratuan Islam Darah Putih. Selain itu perlawanan Keratuan Islam Darah Putih pada tahun 1850-1856 ini merupakan perlawanan dalam skala besar yang melibatkan sebagian masyarakat Banten dan Lampung. Pembahasan yang akan dikaji dalam penelitian ini meliputi beberapa hal penting. Pertama, keadaan Lampung sebelum terjadi perlawanan Keratuan Islam Darah Putih, kedua proses terjadinya gerakan perlawanan Keratuan Islam Darah Putih, mulai dari persiapan hingga terjadinya perang, dan ketiga, dampak yang dihasilkan dari gerakan perlawanan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian sejarah meliputi heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Kata Kunci: perlawanan, Keratuan Islam Darah Putih, kolonialisme Belanda.

PENDAHULUAN

Keratuan Islam Darah Putih merupakan pemerintahan Islam lokal yang ada di Lampung yang menguasai daerah Rajabasa dan Kalianda. Nama aslinya adalah Keratuan Darah Putih, penulis menambahkan kata Islam dalam keratuan ini karena sistem kepemimpinan ratu yang ditunjuk sebagai pemimpin dipilih berdasarkan sistem musyawarah seperti yang diajarkan di dalam agama Islam. Kemudian salah satu syarat yang menjadi dasar pemilihan ratu ini adalah telah memeluk agama Islam dan mendapatkan restu dari Kesultanan Banten ditandai dengan sebuah piagam yang disebut dengan Dalung. Dalung yaitu piagam yang ditulis di atas lempengan tembaga, atau benda lainnya. Masyarakat yang ada di bawah keratuan ini adalah masyarakat yang telah memeluk agama Islam sehingga pemimpin dan masyarakat yang dipimpin menggunakan hukum adat yang telah disesuaikan dengan ajaran agama Islam. Keratuan sendiri merupakan kumpulan dari beberapa kelompok masyarakat yang memiliki hubungan genealogis dan menempati daerah tertentu.

Asal usul nama Darah Putih merupakan pembuktian Minak Gejala Ratu (ratu pertama Keratuan Islam Darah Putih) kepada Fatahillah (ayah Minak Gejala Ratu) bahwa ia benar merupakan anaknya. Berdasarkan cerita yang ada ketika Minak Gejala Ratu datang ke kerajaan Banten ia disuruh oleh Fatahillah menggores dahinya dengan sebutir biji padi, apabila dahi Minak Gejala Ratu mengeluarkan darah merah maka ia bukan anaknya dan apabila yang keluar adalah darah putih (seperti tetesan keringat) maka ia adalah anak dari Fatahillah. Kemudian segera minak Gejala Ratu menggores dahinya dengan biji padi tersebut dan darah yang keluar adalah darah putih, maka kemudian keratuan yang dipimpin oleh Minak Gejala Ratu diberi nama Keratuan Darah Putih.¹

¹Fauziah Arief, dkk., *Cerita Sejarah Lampung Selatan* (Lampung: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Lampung Selatan, 2016), hlm. 1-5.

Keratuan ini berdiri sekitar abad ke-16 M. dan memiliki hubungan pertalian darah dengan Fatahillah (Sultan Banten).² Raja pertama dari keratuan ini adalah Ratu Darah Putih (gelar Minak Kejala Ratu) anak dari Fatahillah dari pernikahannya dengan Putri Sinar Alam. Ketika Ratu Darah Putih menjalankan pemerintahannya di Keratuan Islam Darah Putih, Kesultanan Banten pada saat itu dipimpin oleh Sultan Hasanuddin yang merupakan saudara seayah dari Fatahillah. Sejak awal berdiri, Keratuan Islam Darah Putih sudah memiliki hubungan yang sangat baik dengan Kesultanan Banten dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan juga bidang agama. Hubungan yang baik antara kedua pemerintahan ini dapat dilihat pada *Saksi Dalung*³ yang berbunyi sebagai berikut: *Lamun ana musuh Banten, Banten pengerowa Lampung tutwuri, Lamun ana musuh Lampung, Lampung pengerowa Banten tutwuri*, terjemahannya: kalau ada musuh Banten, Banten di depan Lampung di belakang, kalau ada musuh Lampung, Lampung di depan Banten di belakang.⁴

Setelah Banten dihapuskan oleh Daendels pada tahun 1808, terjadi beberapa perlawanan di Banten dan Lampung. Alasan dari perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat di Lampung adalah untuk mempertahankan pemerintahan Keratuan Islam Darah Putih dan memprotes dihapusnya Kesultanan Banten. Sekitar tahun 1834 ketika Radin Imba diasingkan ke Timor⁵ Keratuan Islam Darah Putih kemudian mengalami kekosongan pemerintahan.⁶ Pemegang pemerintahan untuk sementara diwakilkan kepada Dalam

²Departemen Agama, *Ensklopedi Islam Indonesia* (Jakarta: CV. Anda Utama, 1993), hlm. 976.

³Nama lain dari dalung ini adalah Dalung Kuripan atau sering disebut dengan Piagam Kuripan yang berisi perjanjian antara Kesultanan Banten dan Keratuan Islam Darah Putih di Lampung untuk saling membantu. Dalung ini ditulis di atas lempengan tembaga yang dipahat. Untuk dapat membaca dalung ini maka lempengan ditaburi tepung atau bedak agar rongga-rongga pada lempengan dapat dibaca. Lihat di Fauziah Arief, dkk., *Cerita Sejarah Lampung Selatan*, hlm.7.

⁴M. Soejata, dkk, *Perlawanan terhadap Imperialisme dan Kolonialisme di Daerah Lampung* (Jakarta: Manggal Bakti, 1993), hlm. 17.

⁵R. Broesma, *De Lampoengsche Districten*, (Batavia: Javansche Boekhandel and Drukkerij, 1855), hlm. 36.

⁶Bukri, dkk., *Sejarah Daerah Lampung* (Jakarta: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 1981), hlm. 78-79.

Mangkubumi (1834-1850). Sementara pemerintahan dipegang oleh Dalom Mangkubumi, Radin Intan II yang masih kecil diajarkan berbagai ilmu agama oleh ibunya dan para haji Wakhia dari Banten.

Haji Wakhia adalah seorang haji yang pernah ikut dalam perlawanan Keratuan Islam Darah Putih pada masa Radin Imba, namun setelah Radin Imba diasingkan ia pergi ke Makkah dan kembali ke Banten pada tahun 1847. Ia kemudian ikut dalam perlawanan di Banten pada tahun 1850 dengan menjadi pimpinan pasukan dari Budang Batu. Akan tetapi, setelah beberapa bulan melakukan perlawanan, teman-teman Haji Wakhia akhirnya ditangkap oleh Belanda sedangkan ia sendiri berhasil melarikan diri ke Lampung.⁷

Setelah melarikan diri ke Lampung, ia kemudian melanjutkan perlawanan melawan Belanda dengan bergabung bersama pasukan Banten yang ada di Lampung dan menjalin kerjasama dengan Radin Intan II. Ia mengangkat Radin Intan II sebagai ratu⁸ di Keratuan Islam Darah Putih.⁹ Pengangkatan Radin Intan II ini tidak hanya bermaksud untuk menyatukan kembali masyarakat Lampung di bawah pimpinan Keratuan Islam Darah Putih yang ada daerah Kalianda dan Rajabasa tetapi juga sebagai sarana bagi Haji Wakhia dan para pejuang dari Banten untuk melanjutkan perlawanan terhadap kolonialisme Belanda.

Terdapat beberapa alasan yang membuat perlawanan Keratuan Islam Darah Putih ini menjadi penting, diantaranya yaitu perlawanan ini merupakan lanjutan dari perlawanan yang telah dilakukan baik di Banten maupun di Lampung akan tetapi, dalam skala yang lebih besar. Selain itu, perlawanan tahun 1850-1856 merupakan akhir perlawanan Keratuan Islam Darah Putih, karena setelah Radin Intan II berhasil dikalahkan, pemerintah

⁷Sartono Kartodirdjo, *Pemberontakan Petani Banten 1888* (Jakarta: PT Dunia Pustaka Jaya, 1984), hlm. 181.

⁸Orang Lampung menyebut raja dengan sebutan ratu. Arti ratu sendiri adalah pemegang peranan, atau pemegang kekuasaan. Lihat di Departemen Agama, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, hlm. 976.

⁹Hilman Hadikusuma, *Masyarakat dan Adat Budaya Lampung* (Bandung: Mandar Maju, 1989), hlm. 62.

Belanda akhirnya berhasil menguasai Lampung secara penuh. Alasan lain yaitu perlawanan merupakan bentuk protes masyarakat yang tidak setuju dengan pergantian pemerintahan Islam lokal yang ada sekaligus melawan penyebaran agama Kristen oleh Belanda, sehingga sampai sekarang agama Islam masih menjadi agama mayoritas yang dianut masyarakat Lampung khususnya di daerah Kalianda dan Rajabasa.

Selain itu penulis melakukan penelitian ini karena penulis berasal dari daerah yang pernah menjadi tempat perlawanan ini berlangsung. Alasan lain yang membuat penulis tertarik terhadap perlawanan Karatuan Islam Darah Putih ini karena salah tokoh perlawanan ini yaitu Radin Intan II merupakan pahlawan nasional dari daerah Lampung dan namanya diabadikan menjadi nama jalan, universitas Islam, dan tempat-tempat penting lainnya di Lampung.

Paradigma Teoritis

Pada penelitian ini penulis memakai pendekatan sosial politik dan pendekatan sosial ekonomi. Penggunaan pendekatan sosial politik dan sosial ekonomi pada penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui lebih lanjut faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya perlawanan dan apa saja dampak bagi masyarakat Keratuan Islam Darah Putih. Selain menggunakan pendekatan sosial ekonomi dan sosial politik, penulis juga membuat beberapa konsep sebagai berikut:

1. Gerakan Sosial

Menurut kamus besar bahasa Indonesia gerakan sosial adalah tindakan atau agitas terencana yang dilakukan oleh suatu kelompok masyarakat yang disertai program terencana yang ditujukan pada suatu perubahan atau sebagai gerakan perlawanan untuk melestarikan pola-pola dan lembaga yang ada.¹⁰ Perlawanan atau desakan untuk mengadakan perubahan dapat dikategorikan sebagai perubahan sosial. Gerakan sosial lahir dari situasi yang

¹⁰kbbi.web.id. diakses pada tanggal 29 Desember 2016.

dihadapi masyarakat karena adanya ketidakadilan dan sikap sewenang-wenang terhadap masyarakat. Gerakan sosial secara teoritis merupakan sebuah kebijakan yang lahir atas prakarsa masyarakat dalam usaha menuntut dalam usaha menuntut perubahan dalam institusi atau struktur pemerintahan.¹¹

Jurgen Habermas, sebagaimana dikutip oleh Pasuk Phongpaichit menyatakan bahwa gerakan sosial merupakan hubungan defensive individu-individu untuk saling melindungi ruang publik dan privasi mereka dengan melawan sebuah sistem negara dan pasar.¹² Anthony Giddens menyatakan gerakan sosial sebagai upaya kolektif untuk mengejar kepentingan bersama atau gerakan bersama melalui tindakan kolektif (*action collective*) diluar ruang lingkup lembaga-lembaga yang mapan.¹³ Sedangkan Mansur Fakih menyatakan bahwa gerakan sosial dapat diartikan sebagai kelompok yang terorganisir secara tidak ketat dalam rangka tujuan sosial terutama dalam usaha merubah struktur maupun nilai sosial.¹⁴ Sejalan dengan pengertian gerakan sosial diatas Robert Blumer merumuskan gerakan sosial sebagai sejumlah besar orang yang bertindak bersama atas nama sejumlah tujuan atau gagasan.¹⁵ Robert Misel dalam bukunya yang berjudul Teori Pergerakan Sosial mendefinisikan gerakan sosial sebagai seperangkat keyakinan dan tindakan yang tidak terbelembaga yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk memajukan atau menghalangi perubahan dalam masyarakat.¹⁶

Lebih lanjut mengenai gerakan sosial Karl Marx berpendapat bahwa sebuah gerakan sosial terjadi karena adanya konflik di dalam masyarakat. Sebuah perubahan hanya dapat diubah melalui perjuangan memperebutkan kekuasaan yang akhirnya setelah sistem masyarakat lama runtuh, diganti

¹¹Juwono Sudarsono (ed), *Pengembangan Politik dan Perubahan Politik* (Jakarta: Gramedia, 1976), hlm. 24-25.

¹²<http://pioner.netserv.chula.ac.th/~ppasuk/theorysocmovt.doc>.

¹³Fadhilla Putra, dkk., *Gerakan Sosial, Konsep, Strategi Aktor, Hambatan Dan Tantangan Gerakan Sosial Di Indonesia* (Malang: PlaCID's dan Averroes Press, 2006), hlm. 1.

¹⁴Mansoor Fakih, *Tiada Transformasi Tanpa Gerakan Sosial*, dalam Zaiyardam Zubir, *Radikalisme Kaum Terpinggir: Studi Tentang Ideologi, Isu, Strategi Dan Dampak Gerakan* (Yogyakarta: Insist Press, 2002), hlm. xxvii.

¹⁵www.sastriomunandar-Multiply.com

¹⁶Robert Misel, *Teori Pergerakan Sosial* (Yogyakarta: Resist Book, 2004), hlm. 6-7.

dengan bentuk dan struktur masyarakat yang baru. Menurut Karl Mark sistem sosial dibagi menjadi dua yaitu *pertama*, adanya kelompok penindas dan *kedua* adanya masyarakat yang ditindas. Hubungan antara dua kelompok ini adalah hubungan eksploitatif. Kelompok yang berkuasa selalu memberlakukan nilai-nilai dan pandangan-pandangan atas kelompok yang ditindas. Apa yang dianggap baik oleh penguasa harus diakui sebagai sesuatu yang baik bagi kelompok yang ditindas.¹⁷ Menurut David Lockwood konflik adalah perselisihan atau permusuhan antara individu atau kelompok dalam masyarakat karena interes terhadap kepentingan tertentu.¹⁸ Perselisihan dan pemaksaan-pemaksaan ini akhirnya menghasilkan konflik karena tidak sesuainya aturan-aturan yang diterapkan oleh penguasa dalam hal ini (Belanda) kepada masyarakat Lampung sebagai kelompok yang ditindas.

2. Kepemimpinan dan Peranan

Kepemimpinan adalah kedudukan atau kemampuan seseorang untuk memimpin sebuah golongan atau masyarakat.¹⁹ Menurut Max Weber munculnya seorang pemimpin di dalam masyarakat yang membangun karena ia melihat sifat-sifat kharismatik. Kharismatik disini diartikan sebagai sifat yang timbul karena unsur kesaktian atau kekuasaan yang dianggap luar biasa yang melekat atau dimiliki oleh seseorang yang menurun sebagai warisan leluhurnya. Sedangkan untuk tipe kepemimpinan, Max Weber membagi kepemimpinan menjadi dua model yaitu, *pertama*, model tradisional yaitu kepemimpinan yang timbul ksebagai warisan turun menurun, misalnya raja. *Kedua*, kepemimpinan rasional, yaitu pemimpin yang diangkat kerena kemampuan individu yang menyebabkan ia dapat diterima secara rasional (karena sifa-sifatnya seperti jujur, cerdas, dan lain-lain). Adanya sifat-sifat yang terpuji ini kemudian menyebabkan masyarakat hormat kepada individu tersebut.²⁰ Contoh

¹⁷Rustam E. Tamburaka, *Pengantar Ilmu Sejarah, Teori Filsafat Sejarah, Sejarah Filsafat dan Iptek* (Jakarta: P.T Rineka Cipta, 1990), hlm. 101.

¹⁸*Ibid.*, hlm 102.

¹⁹*Ibid.*, hlm. 92.

²⁰*Ibid.*, hlm. 94.

kepemimpinan rasional seperti kepemimpinan presiden dan perdana menteri. Pada tipe ini seorang pemimpin dihormati dan diakui kepemimpinannya berdasarkan hukum.²¹ Kepemimpinan Keratuan Islam Darah Putih dalam hal ini dikategorikan ke dalam kepemimpinan tradisional karena model kepemimpinannya berbentuk kerajaan.

Dalam kepemimpinan, antara pemimpin dan masyarakat yang dipimpin masing-masing memiliki peranan masing-masing. Peranan ini menjadi sangat penting untuk mengetahui apa saja tanggung jawab dan kewajiban masing-masing individu dalam organisasi. Mengenai konsep peranan, Soerjoeno Soekanto berpendapat bahwa peranan atau (role) merupakan proses dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena antara satu dengan yang lain saling berketegantungan.²²

Menurut Soerjoeno Soekanto peranan meliputi tiga hal yaitu:

- a. Peranan merupakan norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat.
- b. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.²³

3. Mobilitas, Solidaritas, Stratifikasi Sosial

Secara keseluruhan mobilitas atau berpindah dapat digunakan dalam empat cara *pertama*, penggunaan berpindah untuk menunjukkan sesuatu yang berpindah atau dapat berpindah. *Kedua*, pemahaman tentang perpindahan

²¹PIP Jones, *Pengantar Teori-Teori Sosial Dari Tipe Fungsionalis Hingga Tipe Postmoderen* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2010), hlm. 116-117.

²²Soerjoeno Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Press, 2009), hlm. 212-213.

²³*Ibid.*

sekelompok orang atau suatu keramaian yang sulit dikendalikan. *Ketiga*, terdapat pemahaman tentang mobilitas yang digunakan dalam sosiologi ilmu pengetahuan sosial arus utama. Pemahaman ini adalah mobilitas naik dan turun. *Keempat*, mobilitas sebagai migrasi atau jenis lain perpindahan geografis semi permanen.²⁴ Menurut Soerjoeno Soekanto mobilitas sosial adalah gerak dalam struktur sosial yaitu pola-pola tertentu yang mengatur organisasi atau suatu kelompok sosial. Struktur sosial mencakup sifat-sifat hubungan individu dalam kelompok dan hubungan individu dalam kelompoknya.²⁵

Perpindahan masyarakat dari satu tempat ke tempat lain ini kemudian menghasilkan permasalahan baru yaitu eksistensi sosial. Menurut Emile Durkhem masalah sentral dari eksistensi sosial adalah masalah keteraturan bagaimana mencapai solidaritas sosial. Dalam masyarakat pra-moderen atau tradisional solidaritas sosial dapat dengan mudah dicapai karena kesamaan cara hidup yang hampir sama antara satu dengan yang lainnya. Bentuk solidaritas pada masyarakat pra-moderen dan tradisional ini disebut dengan solidaritas mekanik, yaitu solidaritas yang dicapai dengan cara pembagian kerja yang sederhana.²⁶ Solidaritas sosial ini dapat dicapai dengan adanya kesamaan cara pandang yang dalam perlawanan Keratuan Islam Darah Putih dilatar belakangi oleh keinginan untuk melawan kolonialisme Belanda. Adanya kesamaan ideologi dalam masyarakat juga berpengaruh terhadap kesamaan pandang masyarakat. Dalam perlawanan Keratuan Islam Darah Putih ini, agama Islam menjadi alat pemersatu masyarakat untuk memerangi Belanda yang dianggap kafir.

Pembagian kerja dalam masyarakat kemudian menghasilkan stratifikasi sosial. Menurut Soerjono Soekanto stratifikasi sosial atau lapisan sosial adalah pembedaan penduduk atau masyarakat dalam masyarakat kedalam kelas-kelas

²⁴Bryan S. Turner(ed), *Teori Sosial Dari Klasik Sampai Postmoderen* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 800-801.

²⁵Esti Ismawati, *Ilmu Sosial Budaya Dasar* (Yogyakarta: Ombak, 2012), hlm. 61.

²⁶PIP Jones, *Pengantar Teori-Teori Sosial Dari Tipe Fungsionalis Hingga Tipe Postmodern*, hlm. 46.

secara bertingkat. Adanya stratifikasi sosial terjadi dengan sendirinya dalam proses pertumbuhan masyarakat, ada pula yang sengaja disusun untuk mengejar suatu tujuan bersama. Dasar pelapisan sosial ini terjadi dengan sendirinya dengan mengukur antara lain kepandaian, tingkatan umur (senioritas), sifat keaslian anggota kerabat kepala masyarakat, dan harta atau kekayaan dalam batasan tertentu.²⁷

PEMBAHASAN

A. Kondisi Keratuan Islam Darah Putih Pra Perlawanan

1. Kekosongan Pemerintahan Keratuan Islam Darah Putih

Sekitar tahun 1834 ketika Radin Imba diasingkan ke Timor²⁸ Keratuan Islam Darah Putih kemudian mengalami kekosongan pemerintahan.²⁹ Pemegang pemerintahan untuk sementara diwakilkan oleh Dalem Mangkubumi (1834-1850). Sementara pemerintahan dipegang oleh Dalom Mangkubumi, Radin Intan II yang masih kecil diajarkan berbagai ilmu agama oleh ibu dan para haji dari Banten. Kekosongan pemerintahan ini berlangsung selama 15 tahun. Pada tahun 1850 ketika usia Radin Intan II telah berusia 18 tahun, ia diangkat sebagai ratu di Keratuan Darah Putih.

2. Diambilnya Tanah Marga

Masyarakat Lampung pada umumnya bekerja sebagai petani dengan menggarap sawah dan berkebun. Beberapa tanaman yang ditanam di kebun antara lain seperti kelapa, lada, cengkeh, dan karet. Sistem bertani masyarakat Lampung pada umumnya berpindah-pindah dengan membuka lahan-lahan baru dengan menebang pohon-pohon di hutan dan membakarnya. Lada di Lampung sudah sejak dahulu terkenal sejak abad ke-16. Lada yang dihasilkan di Lampung terkenal dengan nama Lada Kawur. Tumbuhan lada ini banyak

²⁷Esti Ismawati, *Ilmu Sosial Budaya Dasar*, hlm. 46.

²⁸R. Broesma, *De Lampoengsche Districten*, (Batavia: Javansche Boekhandel and Drukkerij, 1855), hlm. 36.

²⁹Bukri, dkk., *Sejarah Daerah Lampung* (Jakarta: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 1981), hlm. 78-79.

diminati oleh masyarakat Eropa sehingga ketika Belanda berhasil menguasai Banten maka pemerintah Belanda dengan mudah mengendalikan perdagangan lada di Lampung. Selain mengendalikan perdagangan lada di Lampung, pemerintah Belanda juga melarang masyarakat menjual lada kepada pihak lain selain pemerintah Belanda.

Setelah berhasil menguasai perdagangan lada di Lampung pemerintah Belanda mulai membuka perkebunan kopi di Lampung. Pada tahun 1841 pemerintah Belanda di Batavia mengirimkan beberapa insinyur pertanian untuk meneliti Lampung. Para insinyur pertanian ini bertugas untuk meneliti Lampung yang akan dijadikan sebagai lahan untuk perkebunan kopi. Hasil penelitian dari para insinyur ini kemudian dijadikan acuan pemerintah Belanda untuk mengembangkan perkebunan kopi. Para insinyur ini juga ditugaskan memberi pelatihan kepada para petani di Lampung agar hasil perkebunan meningkat sehingga pemerintah Belanda mendapatkan pemasukan dari perkebunan-perkebunan tersebut.

Dalam pembukaan lahan perkebunan kopi di Lampung ini pemerintah Belanda mengambil alih tanah-tanah milik marga dan tanah-tanah milik masyarakat. Tanah-tanah milik marga yang pada awalnya dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat setelah diambil alih oleh pemerintah Belanda tidak lagi digunakan untuk masyarakat sekitar. Bagi masyarakat yang ingin menggunakan tanah marga dikenakan pajak tinggi, dan bagi masyarakat yang tidak mempunyai lahan untuk digarap maka dipekerjakan di kebun-kebun milik Belanda namun dengan gaji yang rendah. Kebijakan pemerintah Belanda yang memonopoli perdagangan lada, mengambil alih tanah marga, dan sikap yang buruk terhadap masyarakat ini nantinya menjadi penyebab masyarakat menentang pemerintah Belanda.

3. Mengungsinya Haji-Haji Banten Ke Lampung

Hubungan yang terjadi antara pemerintahan Keratuan Islam Darah Putih dengan Kesultanan Banten tidak hanya sebatas hubungan politik dan ekonomi saja. Sejak awal masuknya pengaruh Banten di Lampung, banyak dari

masyarakat Lampung yang pergi ke Banten untuk belajar ilmu agama. Pada awalnya, masyarakat yang belajar ilmu agama ke Banten berasal dari kalangan bangsawan. Alasan mereka belajar ilmu agama adalah sebagai bekal untuk memimpin Lampung dan mengombinasikan hukum Islam dengan hukum ada yang berlaku. Setelah merasa cukup menuntut ilmu di Banten, para penguasa ini kembali ke Lampung dengan mengajak seorang guru agama dari Banten untuk mengajar di Lampung. Maksud diajak guru agama ini adalah untuk mengajarkan ilmu agama juga kepada masyarakat sekaligus menjadi penasehat pemerintah dalam mengambil sebuah kebijakan.³⁰

Setelah berhasil mengajarkan ilmu agama di Banten, guru agama tersebut diberi lahan yang dijadikan tempat pemondokan agar masyarakat lebih leluasa belajar ilmu agama. Pada tahun 1840-an setelah terjadi banyak kerusuhan di Banten yang mengikut sertakan para haji. Banyak dari haji-haji Banten kemudian melarikan diri ke Lampung. Salah satu haji yang ikut serta mengungsi adalah Haji Wakhia yang ikut serta dalam perlawanan Keratuan Islam Darah Putih 1850-1856.³¹

B. Jalannya Perlawanan Keratuan Islam Darah Putih

a. Persiapan Penyeragan Tahun 1850

Untuk memudahkan pengaturan pemerintahan, Radin Intan membagi daerah kekuasaannya menjadi empat bandar. Keempat bandar tersebut adalah Bandar Penengahan, Bandar Legon, Bandar Pesisir/Ketibung, dan Bandar Rajabasa. Setiap bandar ini dikepalai oleh kepala bandar yang berpangkat Pangeran sekaligus merangkap sebagai Hulubalang. Radin Intan II kemudian membagi setiap bandar menjadi empat paksi (marga) yang dipimpin oleh seorang kria/karya. Tugas dari seorang kria adalah menyelenggarakan

³⁰Husin Suyuti, dkk., *Banten Kota Pelabuhan Jalan Sutra: Kumpulan Makalah Diskusi* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1997), hlm. 171.

³¹Sartono Kartodirdjo, *Peberontakan Petani Banten 1888* (Jakarta: PT Dunia Pustaka Jaya, 1984), hlm. 179.

pemerintahan sipil sekaligus sebagai orang yang mengatur segala hal yang berhubungan dengan kemileteran di daerahnya masing-masing.

Setelah terbagi menjadi empat paksi masing-masing paksi dibagi lagi menjadi empat pekon yang dikepalai oleh seorang tumenggung sekaligus sebagai prajurit. Dari setiap pekon ini masing-masing dibagi lagi menjadi kesatuan-kesatuan yang lebih kecil lagi yang terdiri dari 10 kepala keluarga yang masing-masing dikepalai oleh seorang ngabehi.

Radin Intan II sendiri sebagai ratu di Keratuan Islam Darah Putih sekaligus panglima perang. Pusat pemerintahan Radin Intan kemudian dipusatkan di desa Kahuripan. Untuk menjalankan pemerintahannya, Radin Intan dibantu oleh 12 punggawa yang berasal dari dua belas paksi yang berasal dari empat bandar. Untuk menegakkan hukum dan peradilan Radin Intan dibantu oleh dua buah badan hukum yaitu Badan Penuntut Umum yang dikepalai oleh Tumenggung Jaksa, dan Badan Kehakiman yang dikepalai oleh Tumenggung Pertanda.

Pada dasarnya sistem pertahanan dan keamanan Radin Intan II adalah seperti yang kita kenal sekarang sebagai doktrin perang wilayah. Sistem pertahanan ini memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh sebuah daerah dengan menggunakan unsur-unsur pertahanan yang ada di daerah tersebut seperti sungai, lembah, gunung atau lainnya untuk dapat memenangkan peperangan. Daerah Lampung Selatan atau tepatnya Kalianda dan Rajabasa adalah daerah pesisir dan pegunungan yang memiliki hutan-hutan yang lebat dan lereng-lereng gunung yang curam, sehingga menyulitkan musuh untuk mendekati daerah pertahanan.

b. Penyerangan Keratuan Islam Darah Putih Ke Pos Belanda Di Kampung Way Orang Tahun 1850-1851

Kapten Yuch melaporkan kerusuhan-kerusuhan di Lampung kepada pemerintah Belanda di Batavia. Berdasarkan surat keputusan pemerintah Belanda bertanggal 2 Desember 1850, pemerintah pusat di Batavia memerintahkan asisten residen Belanda di Lampung untuk meredam

kerusuhan-kerusuhan di Lampung. Pemerintah Belanda di Batavia tidak akan mengirimkan bantuan tentara ke luar Lampung untuk membantu meredakan kerusuhan-kerusuhan tersebut. Angkatan laut yang ada di Lampung diperintahkan untuk memperketat pengamanan di laut dan melakukan patroli di perairan sekitar daerah tempat kerusuhan.

Adanya patroli di sekitar laut Negara Ratu dan Dantaran menyebabkan kegiatan perdagangan melalui jalur laut di daerah ini menjadi lumpuh. Banyak kerugian yang diderita oleh penduduk dua kampung ini karena adanya penjagaan di laut sekitar daerah Negara Ratu dan Dantaran. Untuk mengalihkan perhatian patroli Belanda yang ada di laut, penduduk Negara Ratu dan Dantaran kemudian menyerang kampung Way Orang yang menjadi tempat pertahanan Belanda di darat. Maksud dari penyerangan ini agar patroli Belanda pergi dari perairan Negara Ratu dan Dantaran. Dengan adanya penyerangan ke Kampung Way Orang sebagai tempat pertahanan Belanda di Kalianda, Kapten Yuch yang merasa tidak sanggup menghadapi kerusuhan ini kembali meminta bantuan kepada pemerintah Belanda di Batavia. Setelah pemerintah Belanda dari Batavia melakukan peninjauan langsung ke Lampung akhirnya dengan keputusan pemerintah tertanggal 30 September 1851, pemerintah Belanda di Batavia mengirimkan sebuah pasukan bersenjata mortal Coehoom dipimpin oleh Letan van Gorkum. Pasukan bantuan ini menaiki kapal perang Borneo yang berlayar dari Semarang menuju ke Lampung. Pasukan ini kemudian bergabung dengan pasukan yang ada di Lampung untuk menyerang marga-marga yang mendukung Keratuan Islam Darah Putih di bawah pimpinan Radin Intan II.³²

c. Persekutuan Keratuan Islam Darah Putih Dengan Pangeran Singa Branta
Dari Marga Rajabasa Tahun 1852

Pada bulan Juni 1852 Pangeran Singa Branta melakukan penyerangan terhadap saudara iparnya yang bernama Tingie Besar. Penyebab penyerangan

³²Arsip Nasional Republik Indonesia, *Algemeen Verslag: 1850*. Arsip Keresidenan Banten, No. 105.

ini adalah perbedaan pendapat antara Tinggie Besar dan Pangeran Singa Branta. Dalam penyerangan inti terjadi perkelahian antara Tinggie Besar dan Pangeran Singa Branta yang menyebabkan masyarakat di Rajabasa resah. Mendengar berita pertikaian ini pemerintah Belanda di Teluk Betung kemudian memanggil Pangeran Singa Branta dan Tinggie Besar untuk dimintai penjelasan namun, Pangeran Singa Branta menolak panggilan tersebut. Oleh karena Pangeran Singa Branta menolak panggilan tersebut pemerintah Belanda kemudian mengirimkan pasukan untuk menangkap Pangeran Singa Branta. Pasukan ini berangkat dengan menggunakan kapal perang menuju pelabuhan Canti.

Setibanya di pelabuhan Canti, pasukan Belanda melanjutkan perjalanannya dengan berjalan kaki menuju Rajabasa. Setibanya di Rajabasa pasukan Belanda tidak berhasil menangkap Pangeran Singa Branta karena sebelum pasukan Belanda tiba Pangeran Singa Branta dan pengikutnya telah pergi meninggalkan Rajabasa menuju Gunung Bendoewa. Tidak berhasil menangkap Pangeran Singa Branta, asisten residen Belanda di Lampung kemudian mencabut status Pangeran Singa Branta sebagai kepala marga di Rajabasa. Pemerintah Belanda kemudian membujuk masyarakat Rajabasa untuk menangkap Pangeran Singa Branta, namun masyarakat Rajabasa tidak bersedia membantu pemerintah. Dikarenakan takut akan diserang pasukan Belanda banyak dari masyarakat yang kemudian meninggalkan kampung-kampung mereka menuju Gunung Bendoewa bergabung dengan Pangeran Singa Branta. Pemerintah Belanda yang tidak berhasil menangkap Pangeran Singa Branta dan membujuk masyarakat Rajabasa kemudian memutuskan untuk kembali ke Teluk Betung. Setelah semua pasukan Belanda pergi dari Rajabasa, Pangeran Singa Branta dan pengikutnya kembali ke Rajabasa dan menyatakan resmi bergabung dengan pasukan Radin Intan di Negara Ratu.

- d. Desakan Pengajuan Damai Keratuan Islam Darah Putih terhadap Pemerintah Belanda Tahun 1853

Pada bulan Februari tahun 1853 pejabat militer Belanda melakukan patroli di sekitar Kampung Pegantongan. Dalam patroli ini pasukan Belanda yang sedang menyusuri sekitar pantai di Pegantongan bertemu dengan beberapa perahu orang Banten yang bersekutu dengan Kearatuan Islam Darah Putih. Pasukan Belanda menembaki perahu-perahu milik masyarakat Banten tersebut. Masyarakat Banten yang ditembaki pasukan Belanda kemudian membalas tembakan tersebut sambil menyingkir dari pantai dan bersembunyi di perkampungan setempat. Dalam tembak-menembak ini satu orang Banten meninggal karena terkena tembakan polisi Belanda.

Setelah terjadi pertempuran di laut Pegantongan, pemimpin masyarakat Banten di Pegantongan segera melaporkan kejadian tersebut kepada Radin Intan. Segera dilakukan pertemuan darurat antara Radin Intan dan sekutu-sekutunya. Dalam pertemuan ini Radin Intan kemudian menugaskan Pangeran Singa Branta untuk menjalin hubungan dengan Dalom Mangkunegara pemimpin di Teluk Semangka. Alasan hubungan ini karena Mangkunegara merupakan penguasa yang berpengaruh di Teluk Semangka yang ahli dalam pertahanan di wilayah perairan. Dalom Mangkunegara juga memiliki hubungan yang baik dengan pelaut-pelaut Bugis. Dengan adanya hubungan antara Radin Intan dan Dalom Mangkunegara maka pertahanan pasukan Radin Intan di wilayah laut semakin diperkuat.³³

Setelah dilakukan persekutuan dengan Mangknegara dari teluk Semangka, penyerang terhadap pos-pos Belanda di Kalianda dan Teluk Semangka semakin sering terjadi. Pemerintah Belanda di Batavia yang saat itu tengah disibukkan pengiriman bantuan untuk menghadapi perang Jawa yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. Sementara itu, Radin Intan II dan Mangkunegara yang telah melakukan persekutuan semakin membuat pusing pemerintah Belanda di Lampung. Untuk mengamankan daerah Kalianda dan Teluk Semangka, pemerintah Belanda akhirnya mengajukan kesepatan damai

³³Arsip Nasional Republik Indonesia, *Algemeen Verslag over het jaar: 1853*. Arsip Keresidenan Lampung No. 11.

dengan Radin Intan dan Mangkunegara. Dalam pengajuan damai ini, pemerintah Belanda akan memberikan grasi kepada Radin Intan dan sekutunya. Selain itu, pemerintah Belanda akan melonggarkan pengawasan terhadap kapal-kapal yang akan berlabuh di Kalianda, Rajabasa, dan Teluk Semangka. Pemerintah Belanda juga akan mengakui kedudukan Radin Intan sebagai ratu di Keratuan Islam Darah Putih sekaligus penguasa di Rajabasa dan Kalianda.

e. Masa Damai Antara Keratuan Islam Darah Putih dan Pemerintah Belanda Tahun 1854

Keadaan semakin tidak berpihak kepada pemerintah Belanda karena wabah penyakit cacar, dan penyakit demam menahun yang diderita oleh banyak opsir Belanda di Lampung. Memang sejak dahulu daerah Lampung merupakan salah satu daerah yang mejadi epidemik penyakit Malaria. Banyaknya opsir Belanda yang sakit menyebabkan kerugian karena sebagian uang digunakan untuk biaya pengobatan para opsir Belanda tersebut. Tidak hanya opsir Belanda tetapi penyakit cacar dan demam ini juga menyerang masyarakat Lampung. Tercatat sejak tahun 1843 hingga tahun 1853 dari 29.450 jiwa yang ada lebih dari 8.815 jiwa meninggal diakibatkan penyakit cacar dan penyakit demam menahun ini. Dengan banyaknya opsir Belanda yang meninggal ini maka kekuatan pasukan Belanda menjadi berkurang.

Buruknya stabilitas pemerintahan, merosotnya perekonomian, diberlakukan sitem kapitalisme untuk negara jajahan Belanda, banyaknya gerakan perlawanan di berbagai daerah di Lampung, wabah penyakit yang menyebar di Lampung, serta berkurangnya simpati masyarakat Lampung terhadap pemerintahan Belanda menyebabkan pemerintah Belanda menyetujui desakan pengajuan damai Radin Intan. Pada pengajuan damai ini pemerintah Belanda mengirimkan surat kepada Radin Intan yang berisi tawaran kepada Radin Intan untuk disekolahkan, diberi gaji, dan diberi kedudukan penting di dalam pemerintahan namun, dengan syarat Radin Intan mau menghentikan permusuhan dengan Belanda. Sementara itu, pemerintah pusat di Batavia masih disibukkan dengan Perang Jawa yang dipimpin oleh Pangeran

Diponegoro, sehingga perlawanan Radin Intan dianggap belum terlalu penting oleh pemerintah Belanda.

f. Penghianatan Perjanjian Damai Keratuan Islam Darah Putih Tahun 1855

Berdasarkan kesepakatan tahun 1853, Radin Intan II diakui oleh pemerintah Belanda sebagai penguasa di Kalianda dan Rajabasa. Pemerintah juga akan mengendurkan pengawasan terhadap kapal-kapal yang berlabuh di Kalianda dan Rajabasa. Akan tetapi, setelah berjalan selama kurang lebih setahun, kesepakatan antara Keratuan Islam Darah Putih dan pemerintah Belanda dihinai oleh pemerintah Belanda. Pemerintah Belanda kembali mencampuri urusan pemerintahan di Kalianda dan Rajabasa. Pengawasan terhadap kapal-kapal dagang yang hilir mudik di perairan Kalianda dan Rajabasa mulai kembali diperketat oleh pemerintah Belanda. Serta janji pemerintah Belanda yang akan menyekolahkan Radin Intan II tidak pernah terlaksana. Bahkan banyak dari orang-orang Banten yang pergi ke Lampung ditahan oleh polisi-polisi Belanda.³⁴

Melihat hal ini Radin Intan II bersama sekutu-sekutunya kembali melakukan penyerangan ke pos-pos pertahanan Belanda di Kalianda pada tahun 1855. Meskipun telah dijanjikan dengan berbagai penawaran, upaya perdamaian kembali dari pemerintah Belanda tetap ditolak Radin Intan. Bahkan sebagai penolakan perdamaian tersebut Radin Intan dan sekutunya kemudian menyerang pos-pos Belanda dan mengambil alih benteng-benteng yang ada di Rajabasa dan Kalianda.

g. Akhir Perlawanan Keratuan Islam Darah Putih terhadap Belanda Tahun 1856

Pada tahun 1856 pemerintah Belanda mengadakan penyerangan kepada pasukan Radin Intan sambil menunggu bantuan pasukan dari Batavia. Pemerintah Belanda di Batavia kemudian mengirimkan pasukan bantuan ke Lampung di bawah pimpinan Kolonel Waelson. Pasukan bantuan dari Batavia

³⁴Arsip Nasional Republik Indonesia, *Politik Verslaag 1855*. Arsip Keresidenan Lampung No. 23.

ini berjumlah kira-kira seribu prajurit laki-laki yang terdiri dari tiga ratus lima puluh orang Eropa dan sisanya prajurit pribumi dari Jawa, Lampung, dan orang Bugis. Pasukan ini membawa dua belas meriam dengan bermacam-macam ukuran dan tiga puluh ahli menembak. Pada bulan Agustus hingga bulan Oktober 1856 terjadi banyak pertempuran antara pasukan Belanda dengan pasukan Keratuan Islam Darah Putih. Akhir dari pertempuran ini adalah ketika pasukan Belanda berhasil menangkap Radin Intan II pada tanggal 5 Oktober 1856.

C. Dampak Perlawanan Keratuan Islam Darah Putih

1. Penghapusan Sistem Keratuan

Telah disebutkan pada bab sebelumnya, pemerintahan di Lampung terdiri dari marga-marga yang bernaung dibawah sebuah keratuan. Salah satu keratuan yang ada di Lampung adalah Keratuan Islam Darah Putih yang sudah ada sejak abad ke-16 M. Wilayah Kekuasaan Keratuan Islam Darah Putih meliputi daerah Lampung bagian selatan tepatnya di Kalianda dan Rajabasa. Setelah Radin Imba (1828-1834) diasingkan ke Timor oleh Belanda, banyak dari marga-marga yang awalnya bernaung di bawah keratuan ini kemudian terpecah dan mengurus pemerintahannya masing-masing. Sebagian dari mereka memilih berlindung di bawah kekuasaan Belanda, dan sebagiannya lagi menyingkir ke daerah terpencil menghindari kontak dengan pemerintah Belanda.

Dalam menjalankan pemerintahannya di Lampung, pemerintah Belanda mencoba menerapkan sistem sentralisasi seperti sistem pemerintahan di Jawa. Pemerintahan Belanda di Lampung dikepalai oleh seorang Residen dengan dibantu oleh sekretaris dan beberapa orang Belanda yang bertugas sebagai pengontrol.³⁵ Sistem ini kemudian ditentang oleh masyarakat Lampung

³⁵E.P. Hutabarat, *Sejarah Kabangkitan Nasional di Daerah Lampung* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1978), hlm. 178.

karena dalam pengaturan pemerintahan masyarakat Lampung menganut sistem keratuan yang menggunakan musyawarah dengan mengikutsertakan kepala-kepala marga. Setiap kepala marga yang di dalam musyawarah memiliki hak suara dalam pengambilan keputusan. Dengan adanya sistem sentralisasi maka pengambilan putusan dipegang oleh satu pihak dan kepala-kepala marga kehilangan hak suaranya, sehingga sistem sentralisasi ini ditolak di Lampung.³⁶

Agar dapat diterima di Lampung pemerintah kemudian membuat sebuah lembaga pemerintahan yang diberi nama Marga sebagai sarana perkumpulan kepala-kepala marga. Selain untuk menghindari pertentangan dari kepala-kepala marga, lembaga Marga ini juga digunakan pemerintah Belanda untuk mempermudah pengontrolan terhadap marga-marga yang ada di Lampung. Pendirian lembaga ini juga dimaksudkan agar ketika terjadi kekacauan yang merugikan pemerintah Belanda, pemerintah Belanda dengan mudah melancarkan politik adu domba.³⁷ Pendirian lembaga Marga juga dimaksudkan untuk menghapuskan sistem keratuan. Penghapusan sistem keratuan ini sudah dirintis sejak tahun 1825-an. Hal ini dapat dilihat dari sikap Belanda yang tidak mengakui pemerintahan Radin Intan I, Radin Imba dan Radin Intan II sebagai ratu di Keratuan Islam Darah Putih.³⁸

2. Pembukaan Perkebunan Kopi

Sebagaimana keadaan ekonomi di Jawa, Lampung yang menjadi bagian dari Jawa pun mengalami keadaan yang serupa dengan Jawa. Sebagai salah satu daerah penghasil lada, Lampung merupakan daerah penting yang harus dikuasai Belanda. Daerah Lampung yang terdiri dari pegunungan dan juga daerah pesisir menjadikan Lampung sebagai tempat yang cocok untuk mengembangkan perkebunan kopi dan lada. Dalam pengembangan

³⁶Oki Laksito, *Sejarah Perjuangan Pahlawan Nasional Radin Inten II* (Bandar Lampung: CV. Haga Utama, 2003), hlm. 37.

³⁷*Ibid.*, hlm. 36.

³⁸Bukri, dkk., *Sejarah Daerah Lampung* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1981), hlm.76.

perkebunan kopi pemerintah Belanda menjadikan tanah-tanah marga sebagai lahan perkebunan kopi dan mempekerjakan rakyat dengan sistem tanam paksa seperti di Banten.³⁹

Salah satu daerah yang menjadi penghasil lada adalah daerah sekitar gunung Rajabasa dan Kalianda. Daerah ini merupakan daerah pantai dan pegunungan. Di daerah ini terdapat gunung Rajabasa yang sangat strategis untuk penanaman kopi, lada, buah pala, dan cengkeh. Secara iklim, daerah ini memiliki suhu yang panas ketika siang hari karena berada di pinggir pantai dan sangat dingin pada malam hari karena berhadapan langsung dengan Gunung Rajabasa. Hal lain yang menguntungkan bagi daerah ini adalah keberadaan gunung Rajabasa merupakan salah satu gunung berapi yang memiliki tanah yang subur dan sangat cocok untuk lahan pertanian. Karena potensi besar yang dimiliki oleh daerah Rajabasa dan Kalianda ini yang pemerintah Belanda berupaya untuk menguasai daerah ini. Selain itu letaknya yang berada di ujung pulau Sumatera memudahkan hubungan pemerintah Belanda di Lampung dengan pemerintah Belanda di Batavia dengan menggunakan jalur laut.⁴⁰

PENUTUP

Setelah penelitian dilakukan berdasarkan data-data yang didapatkan, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut: 1) Sebelum terjadi perlawanan Keratuan Islam darah Putih pada tahun 1850-1856 sempat terjadi kekosongan pemerintah di Keratuan Islam Darah Putih selama 15 tahun. Meskipun terjadi kekosongan pemerintahan, masyarakat Lampung di bawah pemerintahan Keratuan Islam Darah Putih tetap melakukan perlawanan dengan cara membantu daerah lain yang sedang mengalami konflik dengan Belanda. Adanya kebijakan pemerintah Belanda menjadikan Lampung sebagai daerah pengembangan tanaman kopi menyebabkan kerugian bagi masyarakat.

³⁹Bukri, dkk., *Sejarah Daerah Lampung*, hlm. 96.

⁴⁰*Ibid.*

Penyebabnya adalah karena pemerintah Belanda banyak mengambil alih tanah marga dan tanah milik masyarakat. Banyaknya kerusuhan di Banten menyebabkan banyaknya haji-haji yang ada di Banteng mengungsi ke Lampung; 2) Adanya perlawanan di Lampung disebabkan karena keinginan masyarakat Lampung yang tidak menghendaki pergantian pemerintahan keratuan menjadi sistem kolonial. Perlawanan yang terjadi di Lampung juga dipicu oleh keinginan masyarakat Banten yang ada di Lampung untuk melanjutkan perlawanan terhadap Belanda dengan menjadikan Lampung sebagai tempat perlawanan baru. Dalam perlawanan iniyan teribat adalah masyarakat Lampung yang berada di bawah naungan Keratuan Islam Darah Putih dan juga masyarakat Banten di bawah pimpinan para haji; 3) Kalahnya perlawanan Keratuan Islam Darah Putih berdampak pada penghapusan sistem Keratuan dan digantikan menjadi Marga. Setelah berhasil mengalahkan Keratuan Islam Darah Putih, pemerintah Belanda kemudian mengambil alih perpolitikan di Lampung dan mengoksploitasi alam Lampung dengan membuka perkebunan kopi secara besar-besaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Dudung, *Metodelogi Penelitian Sejarah*. Yogyakarta: Ombak, 2011.
- Arief, Fauziah, dkk., *Cerita Sejarah Lampung Selatan*. Lampung: Dinas Pariwisata Lampung Selatan, 2016.
- Ayantrohaedi, dkk., *Banten Kota Pelabuhan Jalan Sutra.: Kumpulan Makalah dan Diskusi*. Jakarta: C.V. Putra Sejati Jaya, 1997.
- Bukri, dkk., *Sejarah Daerah Lampung*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1981.
- Broesma, R., *De Lampoengsche Districten*. Batavia: Javansche Boekhandel and Drukkerij, 1855.
- Dahana, Abdullah, dkk., *Arus Balik Memori Rempah dan Bahari Nusantara Kolonial dan Postkolonial*. Yogyakarta: Ombak, 2014.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Sejarah Perlawanan terhadap Imperialisme dan Kolonialisme di Daerah Jawa Barat*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1990.
- _____, *Sejarah Daerah Jawa Barat*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1984.
- Dinas Pendidikan Propinsi Lampung, *Tempat-Tempat Peninggalan Bersejarah di Daerah Lampung Selatan*. Lampung: Dinas Pendidikan Propinsi Lampung, 2005.
- E. Tamburaka, Rustam, *Pengantar Ilmu Sejarah, Teori Filsafat Sejarah, Sejarah Filsafat dan Iptek*. Jakarta: P.T Rineka Cipta, 1990.
- Fakih, Mansoer, *Tiada Transformasi Tanpa Gerakan Sosial*, dalam Zaiyardam Zubir, *Radikalisme Kaum Terpinggir: Studi Tentang Ideologi, Isu, Strategi Dan Dampak Gerakan*. Yogyakarta: Insist Press, 2002.
- Hutabrata, E.P, *Sejarah Kebangkitan Nasional di Daerah Lampung*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1978.
- Ismawati, Esti, *Ilmu Sosial Budaya Dasar*. Yogyakarta: Ombak, 2012.
- Jones, PIP, *Pengantar Teori-Teori Sosial Dari Tipe Fungsionalis Hingga Tipe Postmoderen*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2010.
- Kartodirdjo, Sartono, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru 1500-1900 Jilid I*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1993.
- _____, *Pemberontakan Petani Banten 1888*. Jakarta: PT Dunia Pustaka Jaya, 1984.
- _____, *Sejarah Perlawanan-Perlawanan terhadap Kolonialisme*. Yogyakarta: Departemen Pertahanan Keamanan Pusat Sejarah ABRI, 1973.
- Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Bentang Budaya, 1995.

- Laksito, Oki, *Sejarah Perjuangan Pahlawan Nasional Radin Inten II*. Lampung: CV. Haga Utama, 2003.
- Putra, Fadhilah, dkk., *Gerakan Sosial, Konsep, Strateri Aktor, Hambatan Dan Tantangan Gerakan Sosial Di Indonesia*. Malang: PlaCID's dan Averroes Press. 2006.
- Misel, Robert, *Teori Pergerakan Sosial*. Yogyakarta: Resist Book, 2004.
- Marsden, Wilham, *Sejarah Sumatra*. Jakarta: Komunitas Bambu, 2013.
- Soejata, M., dkk., *Perlawanan terhadap Imperiaisme dan Kolonialisme di Daerah Lampung*. Jakarta: Manggal Bakti, 1993.
- Soekanto, Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press, 2009.
- Sударsono, Suwonto (ed), *Pengembangan Politik dan Perubahan Politik*. Jakarta: Gramedia, 1976.
- Suryanegara, Ahmad Mansur, *Api Sejarah Jilid I*. Bandung: PT. Grafindo Media Pratama, 2009.
- Suyuti, Husin, *Hubungan Lampung Dengan Kesultanan Banten dan Palembang Dalam Perspektif Sejarah 1500-1900*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1985.
- S. Turner, Briyan (ed), *Teori Sosial Dari Klasik Sampai Postmoderen*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Wahid, A. Rifai, *Risalah Peperangan di Daerah Lampung Tahun 1856*. Jakarta: Karisma Nur, 2002.
- Weitzel, A.W.P., *Schetsen Uit Het Oorlongsleven In Nederlndsche-Indie De Lampongs In 1856* .TP.TT, 1862.
- Kohler, J.E.H., *Bijdrage tot de Kennis der Geschiedenis van de Lampongs*. Zalt-Bommel: Joh. Noman en Zoon, 1874.

a. Jurnal

- Wijayati, Mufliha "Analisis Prasati Dalung Bojong", dalam Jurnal Jejak Kesultanan Banten Di Lampung Abad XVII, STAIN Jurai Siwo Metro, Volume XI, Nomor 2, Edisi Desember 2011.

Arsip

- Arsip Nasional Republik Indonesia, *Algemeen Verslag: 1850*. Arsip Keresidenan Banten, No. 105.
- Arsip Nasional Republik Indonesia, *Algemeen Verslag over het jaar: 1853*. Arsip Keresidenan Lampung No. 11.
- Arsip Nasional Republik Indonesia, *Politik Verslaag 1855*. Arsip Keresidenan Lampung No. 23.

Website

kbbi.web.id. diakses pada tanggal 29 Desember 2016.

<http://pioner.netserv.chula.ac.th/-ppasuk/theorysocmovt.doc>. Diakses pada 16 Desember 2016.

<http://kelabaisurat.blogspot.co.id/2015/11/raden-intan-berjaya.html#more>.
Diakses pada 10 Mei 2016.

www.sastriomunandar-Multiply.com. Diakses pada tanggal 16 Desember 2016.